



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PENURUNAN ANGKA STUNTING DI DESA SINDULANG KABUPATEN SUMEDANG

Dea Wulan Ramadhani¹⁾, Agustina Setiawan²⁾, Toto Kushartono³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Stunting merupakan kondisi tumbuh kembang anak yang terganggu atau gagal tumbuh yang diakibatkan oleh ketidakcukupan nutrisi dan gizi yang baik untuk waktu yang lama. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan Kebijakan tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting Terintegrasi untuk menekan angka *stunting* yang masih tinggi. Kabupaten Sumedang merupakan daerah tertinggi angka balita *stunting* di Jawa Barat dengan angka 27,6% (Survei Status Gizi Indonesia) pada tahun 2022. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi dari kebijakan penanganan penurunan angka *stunting* yang telah ditetapkan khususnya pada Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang mengatakan ada 4 dimensi yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan yaitu : komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, menunjukkan hasil penelitian bahwa 2 dari 4 dimensi sudah terimplementasikan dengan baik. Maka dari itu, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting Terintegrasi di Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang sudah terimplementasikan dengan cukup baik.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Percepatan Penurunan *Stunting*

Abstract

Stunting is a condition in which the growth and development of children is disrupted or fails to grow resulting from insufficient nutrition and good nutrition for a long time. The Sumedang Regency Government has established a Policy on the Acceleration of Integrated Stunting Rate Reduction to reduce stunting rates that are still high. Sumedang Regency is the area with the highest number of stunted children under five in West Java with a figure of 27.6% (Indonesian Nutrition Status Survey) in 2022. The problem discussed in this study is how to implement the policy of handling the reduction of stunting rates that has been determined, especially in Sindulang Village, Cimanggung District. In this study, the

researcher uses the policy implementation theory of George C. Edward III which says that there are 4 dimensions that can affect the success of a policy, namely: communication, resources, implementation attitudes, and bureaucratic structure. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Based on the results of interviews and observations conducted by the researcher, it shows that 2 out of 4 dimensions have been implemented well. Therefore, the researcher concluded that the policy on the Acceleration of Integrated Stunting Rate Reduction in Sindulang Village, Cimanggung District, Sumedang Regency has been implemented quite well.

Keywords: Policy Implementation, Acceleration of Stunting Reduction

PENDAHULUAN

Kesehatan dimana suatu keadaan yang menunjukkan kondisi sejahtera lahir, batin dan sosial yang memberdayakan setiap orang dalam menjalankan kehidupan yang bermanfaat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan tempat tinggal yang baik dan sehat, dan mendapatkan pelayanan kesehatan”. Di Indonesia, ada banyak masalah terkait kesehatan yang dimana salah satunya mengenai permasalahan gizi yang berlebihan sehingga menyebabkan fiksasi atau kekurangan nutrisi sehat yang menyebabkan gangguan pada anak.

Stunting merupakan dimana kondisi gagal tumbuh kembang pada balita akibat kurang gizi dalam jangka waktu yang lama, adanya paparan infeksi berulang, dan kurang stimulasi. Stunting dapat dipengaruhi oleh status kesehatan remaja, ibu hamil, pola makan balita, serta ekonomi, budaya, maupun faktor lingkungan seperti sanitasi dan akses terhadap layanan kesehatan (Kemenkes, 2022). Stunting menjadi salah satu masalah yang mengganggu, keadaan balita pendek atau biasa disebut dengan stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia saat ini, khususnya di berbagai negara berkembang salah satunya Indonesia. Kekurangan gizi pada masa pertumbuhan anak sejak dini akan menyebabkan terhambatnya perkembangan fisik,

meningkatnya angka penyakit, menghambatnya perkembangan mental anak, dan berujung pada kematian. Balita yang mengalami stunting memiliki resiko lebih tinggi terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan resiko mengalami penyakit degeneratif di masa mendatang.

Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Biro Pusat Statistik (BPS) dan Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting), Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2021. Pada studi ini telah mengumpulkan data di 514 Kabupate/Kota dari 34 Provinsi, dengan jumlah blok sensus (BS) sebanyak 14.889 Blok Sensus (BS) dan 153.228 balita. Hasil SSGI 2021 menunjukkan bahwa angka stunting secara nasional turun sebesar 1,6% per tahunnya dari 27,7% pada tahun 2019 menjadi 24,4% pada tahun 2021. Hampir di setiap provinsi menurun dibanding tahun 2019, dan hanya 5 provinsi yang meningkat. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) diumumkan oleh Kementerian Kesehatan pada Rapat Kerja Nasional BKKBN. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022. Pada tahun normal ini, penurunan kasus stunting diharapkan lebih tajam lagi, sehingga target penurunan stunting di angka 14% di 2024 dapat tercapai (Kemenkes, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pemerintah untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia telah menunjukkan hasil yang cukup baik.

Secara nasional, provinsi Jawa Tengah (20,8), Jawa Barat (20,6), dan Jawa Timur (19,2) masih daerah dengan angka balita stunting tertinggi di Indonesia terutama di pulau Jawa (Kemenkes, 2022). Prevelensi balita stunting berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang merupakan daerah tertinggi angka balita stunting dengan nilai 27,6% pada tahun 2022. Pada tahun sebelumnya angka stunting di Kabupaten Sumedang melonjak drastis dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 22%

(Kemenkes, 2023). Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sumedang telah membuat kebijakan melalui Peraturan Bupati Nomer 82 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Terintegrasi untuk percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sumedang yang terus berkembang. Kebijakan ini dibuat bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak dan kualitas sumber daya manusia yang harus diatasi secara multisektor.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomer 82 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Terintegrasi, pemerintah Kabupaten telah mengoptimalkan penanganan stunting melalui pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan sampai dengan pendanaan untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Sumedang. Strategi untuk mengurangi angka stunting dilakukan dengan sinergi mulai dari pemerintah desa dan kecamatan dengan kabupaten serta komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Sumedang. Menurut pernyataan salah satu pegawai di kantor Desa Sindulang mengatakan bahwa upaya penurunan angka stunting di desa belum berjalan dengan baik dikarenakan belum adanya sosialisasi terkait Peraturan Bupati Nomer 82 tentang penurunan angka stunting. Namun, pemerintah desa sudah membuat program pemberian makanan tambahan, melakukan cek kesehatan ibu hamil dan balita secara rutin, dan membentuk posyandu remaja yang dimana merupakan program pemerintah desa ini diharapkan dapat memutus kenaikan angka stunting di Desa Sindulang.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan penurunan angka stunting di Desa Sindulang Kabupaten Sumedang. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang dimana untuk mencapai suatu keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan publik maka diperlukan empat

faktor yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan stunting di Desa Sindulang Kabupaten Sumedang. Informan yang dipilih dalam penelitian ini diantaranya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa Sindulang, Bidan Desa, Kader PKK dan masyarakat Desa Sindulang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang merupakan informasi yang disampaikan oleh informan/narasumber. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data sekunder dan sumber data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah penelitian secara keseluruhan. Langkah pertama adalah melakukan analisis data, yang berarti mengumpulkan data, menyusunnya secara sistematis, dan kemudian membuat kesimpulan. Kualitas data divalidasi menggunakan teknik triangulasi.

PEMBAHASAN

Kebijakan penanganan masalah stunting di Desa Sindulang Kabupaten Sumedang dilandasi oleh Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Terintegrasi, pemerintah Kabupaten telah mengoptimalkan penanganan stunting melalui pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan sampai dengan pendanaan untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Sumedang. Implementasi kebijakan penanganan stunting di Desa Sindulang Kabupaten Sumedang dapat dilihat melalui 4 fenomena sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu kegiatan penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, maupun gagasan dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Komunikasi yang baik dapat terjalin antara pihak perangkat desa, bidan desa, kader posyandu dan masyarakat dapat diukur dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait yang bertujuan untuk menjalin komunikasi yang baik antara pihak implementor kebijakan dan masyarakat agar terlaksananya implementasi kebijakan daerah dalam penanganan penurunan angka stunting di Desa Sindulang serta mengetahui seberapa efektifnya program yang dibuat oleh pemerintah Desa Sindulang dalam penurunan angka stunting di Desa Sindulang.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, bidan desa dan kader posyandu merupakan jembatan bagi pemerintah desa dalam melakukan penyampaian kebijakan penurunan angka stunting, pemerintah desa juga turut serta dalam melakukan sosialisasi untuk masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan agar masyarakat paham akan pentingnya upaya pencegahan stunting. Bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan penurunan angka stunting yaitu dengan mengikuti kegiatan gabungan bersama puskesmas Cimanggung, mengikuti posyandu rutin untuk memeriksa kesehatan balita setiap bulannya, dan mengikuti sosialisasi mengenai jam SINURMI bagi ibu hamil. Adanya komunikasi yang terjalin secara positif antara implementor kebijakan dan kelompok sasaran dapat mempermudah dan membantu dalam mencapai tujuan dari kebijakan penurunan angka stunting di Desa Sindulang.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi peneliti dari indikator komunikasi yang dilakukan oleh pihak Desa Sindulang terkait dengan implementasi kebijakan daerah dalam penanganan penurunan angka stunting di desa sindulang kabupaten sumedang dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan arahan. Berdasarkan hasil wawancara kepada para implementor dari indikator komunikasi yang semuanya telah dilakukan dengan baik.

2. Sumber Daya

Berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan pemerintah salah satunya adalah faktor sumber daya. Kemampuan dalam memanfaatkan suatu sumber daya yang ada menjadi faktor penting untuk mewujudkan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Sumber daya yang menjadi faktor keberhasilan implementasi kebijakan dapat meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya fasilitas dan lainnya.

Sumber daya merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya ada yang berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal atau tetap. Sumber daya merupakan hal yang penting dalam bagian ini untuk mengimplementasikan kebijakan penurunan stunting yang dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah desa, bidan desa dan kader posyandu untuk masyarakat Desa Sindulang dalam mengimplementasikan kebijakan penurunan angka stunting di Desa Sindulang.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Sindulang, terkait sumber daya manusia masih terdapat pelaksana kebijakan yang kurang memahami apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan penurunan angka stunting di Desa Sindulang, peneliti juga melihat masih kurangnya kekompakan antar pelaksana kebijakan pada saat kegiatan pemberian makanan tambahan sehingga peneliti merasa perlu adanya perencanaan yang matang sebelum pelaksana turun ke lapangan. Pendanaan untuk kegiatan penurunan angka stunting masih terbilang kurang sehingga peneliti merasa pada saat pelaksanaan kegiatan seperti pemberian makanan tambahan, posyandu dan posrem terdapat kendala karena kurangnya pendanaan yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa Sindulang. Peneliti juga melakukan observasi terhadap fasilitas kesehatan yang ada di Desa Sindulang dimana peneliti merasa fasilitas kesehatan yang ada di

Desa Sindulang sudah memadai karena adanya Poskesdes dan Posyandu yang ada di setiap Rw, namun peneliti juga melihat masih banyak alat pemeriksaan di setiap posyandu yang memerlukan pembaruan agar setiap kegiatan pemeriksaan dilakukan secara optimal.

Kesimpulan dari indikator sumber daya sebagai salah satu syarat dari keberhasilan implementasi kebijakan daerah dalam penanganan penurunan angka stunting di Desa Sindulang Kabupaten Sumedang, dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti kepada informan yang ditunjuk terkait kemampuan implementor dalam proses implementasi kebijakan penurunan angka stunting. Namun masih terdapat beberapa kekurangan dari indikator sumber daya dari segi kemampuan implementor yang masih terbilang kurang baik dikarenakan kurangnya pemahaman implementor mengenai kebijakan tersebut sehingga pada saat proses pengimplementasi kebijakan kepada masyarakat tidak tersampaikan dengan rinci dan jelas, dan masih bisa dibilang kurangnya kekompakan antar implementor yang ditunjuk untuk menjalankan kebijakan penurunan angka stunting di Desa Sindulang. Adapun kendala dalam indikator sumber daya dari segi pendanaan masih kurangnya pendanaan untuk program yang diadakan oleh pemerintah desa untuk penanganan penurunan angka stunting di Desa Sindulang, sehingga hal ini dapat menghambat proses pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan penurunan angka stunting di Desa Sindulang. Kemudian sumber daya dalam segi fasilitas yang ada di Desa Sindulang dapat dikatakan sudah memadai mulai adanya posyandu di setiap Rw untuk pemeriksaan balita dan poskesdes untuk pemeriksaan ibu hamil, sedangkan untuk alat medis masih ada beberapa kendala yaitu banyaknya alat untuk pemeriksaan balita diposyandu belum ada pembaruan sehingga hal tersebut dapat menghambat proses implementasi kebijakan penurunan angka stunting di Desa Sindulang.

3. Sikap Pelaksana

Implementasi yang berhasil pelaksana harus tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi juga harus memiliki keinginan untuk menerapkan kebijakan. Perspektif mereka tentang kebijakan dan bagaimana kebijakan memengaruhi kepentingan pribadi dan organisasi mereka akan memengaruhi perspektif mereka. Pusat perhatian pada sikap pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini begitu penting karena kinerja implementor sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat dan cocok dengan para implementor. Pada saat proses implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan, pada beberapa kebijakan dituntut sikap pelaksana yang baik dan disiplin serta konsisten.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Sindulang, terkait sikap pelaksana masih banyak kekurangan peneliti merasa pada saat pelaksanaan kegiatan pemberian makanan tambahan di Kantor Desa Sindulang masih ada pelaksana yang tidak bersikap profesional dalam menanggapi keluhan masyarakat penerima bantuan makanan tambahan, sehingga masyarakat tidak mendapatkan respon yang baik dari pelaksana kebijakan. Kemudian peneliti melakukan observasi terkait pembegian tugas dari kepala desa kepada pelaksana kebijakan sudah sesuai dengan keahliannya masing-masing, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan penurunan angka stunting dapat berjalan dengan maksimal.

Kesimpulan dari indikator sikap pelaksana masih dibilang belum maksimal dikarenakan masih banyaknya implementor yang tingkat pemahamannya kurang sehingga tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan dari kebijakan penurunan angka stunting. Kemudian sikap pelaksana yang diberikan oleh implementor kepada masyarakat masih terdapat kekurangan sehingga hal tersebut dapat menghambat proses implementasi kebijakan penurunan

angka stunting di Desa Sindulang, dengan adanya beberapa pernyataan yang mengatakan bahwa masih adanya sikap implementor yang tidak profesional dan konsisten dari pemerintah desa pada saat pelaksanaan program kerja. Sehingga dalam proses pelaksanaan program penurunan angka stunting di Desa Sindulang tidak mendapatkan hasil dan respon yang sesuai kepada masyarakat Desa Sindulang.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Birokrasi merupakan suatu organisasi yang mempunyai hubungan dengan tujuan yang akan dicapai, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan kebijakan. Implementasi kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama dengan banyak pihak, ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, melihat struktur organisasi yang dibentuk untuk untuk menjalankan kebijakan penurunan angka stunting dapat dikatakan telah sesuai dengan keahliannya masing-masing implementor seperti bidan desa dan kader kesehatan yang melakukan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan balita, serta pemerintah desa yang melakukan monitoring kegiatan penurunan angka stunting di Desa Sindulang. Standart Operational Procedure (SOP) sudah ada sebelum kegiatan penurunan angka stunting di Desa Sindulang diadakan dengan melakukan perencanaan kegiatan sampai dengan pendanaan sesuai dengan aturan yang berlaku bertujuan untuk mencapai keberhasilan suatu kegiatan yang diharapkan oleh masyarakat.

Peneliti juga merasa Kepala Desa melakukan evaluasi berkala yang dilakukan secara rutin pada rapat mingon kecamatan dan rapat loktri yang diadakan oleh puskesmas.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, Struktur organisasi yang di bentuk untuk menjalankan program penurunan angka stunting di Desa Sindulang dapat dikatakan sudah sesuai dengan keahlian para implementor kebijakan. SOP yang berlaku serta dijalankan oleh Pemerintah Desa dapat dikatakan belum maksimal dikarenakan banyaknya petugas yang tidak menaati SOP yang berlaku. Dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan walaupun tidak ada jadwal pasti yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk melaporkan hasil evaluasi kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan mengenai Implementasi Kebijakan Penurunan Angka Stunting di Desa Sindulang Kabupaten Sumedang sudah terimplementasi sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut ini :

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak Desa Sindulang terkait dengan implementasi kebijakan daerah dalam penanganan penurunan angka stunting di desa sindulang kabupaten sumedang dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil wawancara kepada para implementor dari indikator komunikasi yang semuanya telah dilakukan dengan baik.

2. Sumber Daya

Kemampuan implementor seperti Bidan Desa dan Kader Kesehatan dapat dikatakan sudah baik namun dari pihak Pemerintah Desa

perlu adanya peningkatan pemahaman yang matang sebelum berhadapan langsung dengan masyarakat. Dalam hal pendanaan untuk menjalankan program penurunan angka stunting di Desa Sindulang masih menjadi suatu kendala dalam implementasi kebijakan penurunan angka stunting. Serta fasilitas yang tersedia di Desa Sindulang sudah sangat memadai hanya saja perlu adanya pembaruan alat-alat medis di beberapa posyandu.

3. Sikap Perilaku

Sikap dari implementor kebijakan dapat dikatakan belum maksimal dikarenakan masih banyaknya kekurangan dari sikap Pemerintah Desa yang ditunjuk tidak profesional dan konsisten dalam menjalankan suatu program atau kegiatan penurunan angka stunting di Desa Sindulang sehingga tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan dari kebijakan penurunan angka stunting.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang di bentuk untuk menjalankan program penurunan angka stunting di Desa Sindulang dapat dikatakan sudah sesuai dengan keahlian para implementor kebijakan. SOP yang berlaku serta dijalankan oleh Pemerintah Desa dapat dikatakan belum maksimal dikarenakan banyaknya petugas yang tidak menaati SOP yang berlaku. Dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan walaupun tidak ada jadwal pasti yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk melaporkan hasil evaluasi kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 82 Tahun 2019 Tentang
Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting
Terintegrasi

Buku

Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Relitas*. Gorontalo: Ung Press Gorontalo.

Kemenkes. (2022). BUKU SAKU Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Website

Ayosehat.Kemkes.Go.Id. (2022, November 16). Retrieved From Cegah Stunting Itu Penting:

<https://Ayosehat.Kemkes.Go.Id/Cegah-Stunting-Itu-Penting>

Databoks.Katadata.Co.Id. (2023, Februari 2). Retrieved From Prevalensi Balita Stunting Di Kabupaten Sumedang Tertinggi Di JawaBarat Pada 2022:

<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/02/02/Prevalensi-Balita-Stunting-Di-Kabupaten-Sumedang-Tertinggi-Di-Jawa-Barat-Pada-2022>

Kemenkes. (2023, Januari 25). *Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%*. Retrieved from <https://kemkes.go.id/id/riliskesehatan/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244>

Kemkes.Go.Id. (2021, Desember 27). Retrieved From Penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2021 Sebagai Modal Menuju Generasi Emas Indonesia 2045:

<https://Www.Kemkes.Go.Id/Id/Rilis-Kesehatan/Penurunan-Prevalensi-Stunting-Tahun-2021-Sebagai-Modal-Menuju-Generasi-Emas-Indonesia-2045>

Jabarprov.go.id. (2022). Persentase Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat:

<https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/persentase-balita-stunting-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>